

2024

Minggu ke-1 Maret (4 s.d. 10 Maret 2024)

Isu Sepekan

Bidang Polhukam, Komisi II



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENGHAPUSAN GRAFIK DAN TABULASI DATA PEROLEHAN SUARA PADA SIREKAP

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias

Analis Legislatif Ahli Madya
dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak 5 Maret 2024 memperbarui tampilan laman Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dan menghentikan penayangan grafik dan tabulasi rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024. Sirekap adalah sebuah aplikasi yang menampilkan agregat perhitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Aplikasi itu ditampilkan dalam laman pemilu2024.kpu.go.id yang sejak 14 Februari 2024 menampilkan data perolehan suara, mulai dari calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pemilu presiden (pilpres) hingga calon legislatif (caleg) pada DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD. Selama ini publik menemukan ada kesalahan angka raihan suara yang ditampilkan di pemilu2024.kpu.go.id di banding dokumen C.Hasil. Hal itu diakui KPU terjadi karena tidak akuratnya teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) dalam mengonversi foto menjadi teks.

Adapun *real count* KPU dilakukan menggunakan serangkaian proses melalui aplikasi Sirekap. Petugas KPPS memfoto C.Hasil plano, lalu diunggah ke aplikasi Sirekap. Kemudian teknologi OCR yang tersemat di aplikasi itu mengonversi raihan suara dari format gambar menjadi teks. Hasil konversi dari semua TPS selanjutnya diakumulasikan menjadi *real count*, lalu diunggah di laman pemilu2024.kpu.go.id. Di laman tersebut, biasanya ditampilkan total raihan suara pasangan capres-cawapres secara nasional dan di setiap provinsi, serta dilengkapi dengan grafik lingkaran. Di laman yang sama, biasanya ditampilkan total raihan suara partai politik secara nasional, per provinsi, ataupun per daerah pemilihan. Penayangan dilengkapi diagram batang dan ditampilkan total raihan suara caleg. Sirekap saat ini hanya menampilkan hasil pindai penghitungan suara setiap TPS atau formulir C.Hasil dan D.Hasil. Jika masyarakat ingin mengetahui perolehan suara secara nasional, maka harus membuka satu per satu data TPS yang berjumlah 823.220 TPS di seluruh Indonesia.

Menurut Komisioner KPU RI, Idham Holik, penghapusan grafik perolehan suara dilakukan karena tingginya tingkat kekeliruan pembacaan Sirekap terhadap formulir C.Hasil menyebabkan data perolehan suara tidak sesuai dengan hasil di TPS sehingga menimbulkan kesalahpahaman publik. Adapun formulir C.Hasil merupakan catatan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS saat pemilu yang memuat data perolehan suara pasangan capres-cawapres, partai politik, dan caleg. Sejak awal fungsi utama Sirekap memang sebagai sarana transparansi hasil pemungutan suara di TPS, dimana masyarakat dapat melihat langsung hasil suara setiap TPS melalui unggahan foto asli formulir model C.Hasil plano di dalam Sirekap. KPU memastikan bahwa saat ini fokus dalam rekapitulasi manual berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Rekapitulasi berjenjang ini yang menjadi dasar resmi penghitungan suara sah.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita, menilai langkah KPU dalam menghapus grafik perolehan suara tidak tepat dan justru menimbulkan kecurigaan lebih besar pada masyarakat. KPU sebaiknya tetap membuka data dengan menguatkan bahwa data secara manual merupakan data yang akan menjadi pijakan

penentuan hasil. Walaupun tidak ada aturan yang dilanggar dari penghapusan grafik perolehan suara karena Sirekap hanya diatur sebagai data pembanding, bukan dasar penetapan hasil pemilu. Namun penghapusan grafik perolehan suara mencederai prinsip transparansi pemilu.

Adapun pengajar Hukum Tata Negara UI, Titi Anggraini, menilai alasan KPU menutup grafik perolehan suara tidak tepat, terlebih saat rekapitulasi masih berjalan dan menimbulkan spekulasi lain tentang potensi kecurangan pemilu. Sirekap merupakan alat bantu untuk masyarakat memantau proses rekapitulasi suara yang diatur khusus dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. KPU seharusnya fokus pada akar masalah, yaitu ketidakakuratan sistem dan memperbaiki teknologi dengan langkah responsif. KPU diharapkan segera membuka kembali grafik perolehan suara di Sirekap. Sirekap saat ini adalah uji coba untuk penerapan sistem rekapitulasi elektronik di masa mendatang. Hal ini dianggap suatu kemunduran transparansi dari langkah maju yang dicapai KPU. Setiap pemilu ada kemajuan yaitu 2014 hanya mengunggah data hasil scanning, 2019 input manual, dan 2024 kemudian menggunakan teknologi yang diharapkan secara gradual menjadi teknologi rekapitulasi elektronik di masa depan.

Atensi DPR

Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, rekapitulasi penghitungan suara akan berjalan hingga 20 Maret 2024 dan menetapkan hasil Pemilu serentak tahun 2024. Namun demikian, permasalahan dalam Sirekap masih terjadi yaitu ketidakakuratan sistem OCR dalam mengonversi foto menjadi teks sehingga memengaruhi hasil perolehan suara. KPU kemudian menghapus grafik dan tabulasi data perolehan suara pada Sirekap agar tidak terjadi kesalahpahaman publik dan hanya menampilkan foto hasil pindai penghitungan suara setiap TPS.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI perlu mendorong KPU untuk melakukan evaluasi terhadap Sirekap secara keseluruhan dan perbaikan terhadap penggunaan teknologi OCR dalam Sirekap pada Pemilu 2024. Sedangkan dalam fungsi legislasi, Komisi II DPR RI perlu segera melakukan pembahasan terhadap perubahan UU Pemilu yang dapat menjadi landasan hukum terhadap sistem rekapitulasi elektronik yang diharapkan dapat membawa kemajuan dalam proses penghitungan suara pada Pemilu di masa depan.

Sumber

cnnindonesia.com, 7 Maret 2024;
Kompas, 7 Maret 2024;
nasional.kompas.com, 6 dan 8 Maret 2024;
pemilukita.republika.co.id, 9 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
KESRA Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

EDITOR

LAYOUTER



@pusaka_bkdprri

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

EKKUINBANG
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetyawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

KESRA
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.